

LAPORAN PENELITIAN STIMULUS



**PARTAI POLITIK INDONESIA: IDEOLOGI DAN
PERAN POLITIK**

OLEH :

NAMA : Dr. Asran Jalal, M.Si

NIDN : 0328106101

**UNIVERSITAS NASIONAL
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
JAKARTA
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Partai Politik di Indonesia: Ideologi dan Peran Politik.

Peneliti

1.

a. Nama Lengkap : Dr. Asran Jalal, M.Si.
b. NID/NIDN : 0110880246/0328106101
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Pangkat/Golongan : IVA/Penata TK.I
e. Program Studi : Magister Ilmu Politik (MIP)
f. Alamat Rumah : Perumahan Waringin Elok A9/19 RT 004/012 Desa
kedung

Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kab.
Bogor, Jawa Barat.

g. Telepon : 081284526468
h. Email : asran_jalal@yahoo.com

2.

Nama Lengkap : Amanda
NPM : 18011869018
Lama Penelitian : 6 (enam) bulan
Biaya Penelitian : Rp. 7.750.000,-



Mengesahuj,
Direktur Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA.

Jakarta, 10 Januari 2020

Peneliti



Dr. Asran Jalal, M.Si



Menyetujui,
Wakil Rektor Bidang PPMK

Prof. Dr. Erawati Sinaga, MS., Apt.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan hidayah yang diberikah kepada kita semua, sehingga penelitian yang berjudul “Partai Politik di Indonesia: Ideologi dan Peran Politik” dapat diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang tenaga pengajar di perguruan tinggi pada umumnya dan di Universitas Nasional khususnya melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang Penelitian untuk semester ganjil tahun ajaran 2019/2020.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA, atas dorongan yang diberikan kepada penulis untuk meneruskan ide melaksanakan penelitian tersebut di atas, dengan alasan penelitian yang berkaitan dengan konsep dan teori dalam Ilmu Politik masih langka. Terima kasih kepada Ketua Program Studi Ilmu Politik Dr. Alfian Alfian, atas dukungan yang diberikannya.

Terima kasih kepada pimpinan Universitas Nasional memberi kesempatan kepada penulis untuk membuat penelitian sesuai dengan topik yang penulis ajukan. Lebih dari itu dukungan dana yang diberikan kepada penulis, merupakan semangat tambahan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Semoga penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu politik dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya. n rencana.

10 Januari , 2020

Asran Jalal

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Masalahan Penelitian.....	3
C.Pertanyaan Penelitian.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E.Sistematika Penulisan.....	5

BAB II KEARANGKA TEORI

A. Ideologi.....	6
B. Partai Politik.....	7
C. Tujuan partai Politik.....	9
D. Fungsi partai Politik.....	11
E. Sistem kepartaian.....	12
F. Peran Partai Politik.....	14

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	15
B. Sumber Data	15
C. Analisis Data.....	16

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Pemilahan Ideologi Partai Politik17**
- B. Peran Partai Politik Dalam Sistem Politik Indonesia.....23**

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....33**
- B. Temuan Penelitian.....33**

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Nama : Asran Jalal
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Partai Politik di Indonesia Ideologi dan peran Politik

Penelitian bertujuan menganalisis dua pertanyaan penelitian yaitu pertama, apa yang melandasi Ilmuwan politik memilah ideologi partai politik di Indonesia? Kedua, apa bentuk peran partai politik di Indonesia? Apa perubahan dan kesinambungan peran partai politik masa Demokrasi Reformasi dengan masa sebelumnya?

Hasil penelitian adalah para ilmuwan politik memilah ideologi partai politik di Indonesia berdasarkan geografi, agama, dan basis dukungan. Kedua, peran partai politik di Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan. Peran partai politik yang berkesinambungan adalah peran rekrutmen politik.

Temuan penelitian adalah Masa Demokrasi Reformasi partai politik memiliki kekuasaan yang berpengaruh, masa Demokrasi Pancasila kekuasaan partai politik termasuk katagori yang lemah.

Kata Kunci: Partai Politik. Ideologi partai politik, peran partai politik

Abstact

Name : Asran Jalal
Department : Political science
Subject : Poilitical Party in Indonesia: ideology and Political Role

The study aims to analyze two research questions namely, first, what underlies political scientists sort out the ideology of political parties in Indonesia? Second, what is the role of political parties in Indonesia? What is the change and continuity of the role of political parties during the Reformation Democracy with the past?

The results of the study are political scientists sorting out the ideology of political parties in Indonesia based on geography, religion and support base. Second, the role of political parties in Indonesia did not experience significant changes. The role of sustainable political parties is the role of political recruitment.

The findings of the study are the Democratic Period of political party reform having influential power, the Pancasila Democracy period of the power of political parties including the weak categories.

Keywords: Political Parties. The ideology of political parties, the role of political parties

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik merupakan salah satu struktur yang menggerakkan bekerjanya sistem politik melalui fungsi dan perannya. Fungsi partai politik yang strategis antara lain adalah fungsi rekrutmen politik (*political recruitment*). Partai politik dalam suatu sistem politik berfungsi memilih calon-calon yang akan duduk dalam jabatan negara baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah. Partai politik memiliki kewenangan untuk mencalonkan individu yang akan menduduki jabatan presiden dan Wakil Presiden, jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. Partai politik memiliki kewenangan mencalonkan individu yang akan menduduki jabatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Peran Masyarakat adalah memilih calon-calon yang ditetapkan partai politik melalui pemilihan umum (Pemilu).

Keberadaan partai politik di Indonesia dapat dilacak semenjak semenjak penjajahan Belanda. Posisi partai politik pada masa ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu partai politik yang berprinsip *cooperatie* yakni partai politik yang mencita-citakan kedudukan politik dalam lembaga-lembaga pemerintahan kolonial, dan kelompok partai politik *non-cooperatie*, yakni partai politik yang mencita-citakan penyalur aspirasi menentang penjajah Belanda dan sebagai wahana mobilisasi massa. Namun lama-kelamaan baik partai politik yang *cooperatie* dan *non-cooperatie* berperan dalam menentang penjajahan Belanda di Indonesia. Partai politik yang ada pada masa ini antara lain adalah Sarikat Islam berdiri pada tanggal 10 September 1912 oleh Oemar Said Tjokroaminoto.¹

¹ Daniel Dhakidae, "Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia", *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, Pilihan Artikel Prisma, Jakarta: LP3ES, 1991, hal. 197.

Pada masa penjajahan Jepang, partai politik yang sudah ada semenjak penjajahan Belanda tidak dapat berperan secara leluasa dalam memobilisasi massa memperjuangkan kemerdekaan. Partai politik dengan orientasi nasionalis yang mau merombak proses politik, mengusir penjajah dengan usaha mobilisasi dibubarkan berdasarkan keputusan penguasa perang. Partai politik yang dibubarkan antara lain adalah Sarekat Islam. Penjajahan Jepang mendirikan organisasi politik yang bernama Poesat Tenaga Rakyat (Poetera) yang didirikan pada tanggal 9 Maret 1943.²

Partai politik di Indonesia baru mulai muncul dengan landasan konstitusional berdasarkan Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 Nopember 1945 atas usulan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BP KNIP) kepada pemerintah. Isi Maklumat dimaksud terdapat pada poin 1 yang menyatakan “Pemerintah menyukai timbulnya partai politik, karena dengan adanya partai politik itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.”³

Pada masa Demokrasi Parlementer terutama menghadapi Pemilu 1955, terdapat sebanyak 100 (seratus) partai sebagai peserta Pemilu.⁴ Hasil Pemilu, hanya empat partai yang memperoleh suara yang signifikan memperoleh kursi DPR. Partai dimaksud yaitu PNI memperoleh 57 Kursi, Masyumi memperoleh 57 kursi, NU memperoleh 45 kursi, dan PKI memperoleh 39 kursi.⁵ Pada Masa Demokrasi Terpimpin, jumlah partai politik mula berkurang, terutama semenjak partai Masyumi dan PSI dibubarkan Presiden Soekarno.

Pada masa demokrasi Pancasila, Pemilu 1971 terdapat 10 partai politik sebagai peserta, yaitu Golkar (Sekber Golkar), NU, Parmusi, PNI, PSII, Parkindo, Katolik, Perti, IPKI, dan Murba. Pada Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 terdapat 3 (tiga) Partai politik yaitu Golkar dan PDI. Golkar pada 5 (lima) kali pelaksanaan Pemilu memperoleh kursi DPR rata-rata 59,60 %, sisanya diperoleh

² *Ibid*, hal. 198.

³ Lihat Maklumat Pemerintah 3 Nopember 1945.

⁴ Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Institute For Democracy (IDW), 2011, hal. 113-143.

⁵ *Ibid*, hal. 113-143.

PPP rata 19%, PDI rata-rata 7,33 %, dan ABRI 20 %. Komposisi jumlah kursi DPR hasil Pemilu, Golkar dalam membuat keputusan DPR tanpa perlu kerjasama dengan PPP, PDI, dan ABRI, apabila terjadi pemungutan suara, Golkar akan tetap memenangkan pertarungan.

Pada masa Demokrasi Reformasi jumlah partai politik termasuk katagori yang banyak. Gambaran jumlah partai politik pada era reformasi dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1
Jumlah Partai Politik Pada Pemilu Reformasi

	Partai Politik Yang Berdiri	Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu
Pemilu 1999	141	48
Pemilu 2014	200	24
Pemilu 2009	132	38
Pemilu 2014	14	12

Sumber:diolah dari Lili Romli (2017;2)

B. Masalah Penelitian

Partai politik di Indonesia memiliki cirinya sendiri. Ciri dimaksud adalah para ilmuwan memilah ideologi partai politik secara bervariasi dan partai politik memainkan peran secara khas dalam sistem politik Indonesia. Berdasarkan ideologi, Herbert Feith dan Lance Castle memilah ideologi partai politik di Indonesia menjadi 5 yaitu, Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokrasi, dan Komunis. Herbert Feith, masa Orde Baru pengaruh aliran Tradisionalisme Jawa dan Sosialisme Demokrat mengalami modifikasi, berganti dengan aliran Developmentalis Integralis. Menurut Herbert Feith partai politik yang menganut aliran pemikiran politik Islam dan aliran pemikiran politik Nasionalisme akan tetap berperan dalam mewarnai perpolitikan di Indonesia.⁶

⁶ Herbert Feith & Lance Castles (ed), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta:LP3ES, 1988, hal. xxv-xxii.

Partai politik pasca-kemerdekaan dalam sistem politik Indonesia memainkan perannya dalam dinamika politik Indonesia semenjak sistem Demokrasi Parlementer (1949-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Demokrasi Pancasila (1965-1998), dan masa Demokrasi Reformasi (1998-sekarang), dengan tingkatan yang berbeda-beda. Peran partai politik pada masa sistem Demokrasi Parlementer termasuk katagori besar, partai-partai politik yang ada ketika itu memainkan peran dalam pemerintahan atau kabinet, sementara sebahagian lagi kebetulan tidak ikut dalam koalisi memainkan peran sebagai oposisi atau sebagai pengawas terhadap tingkah laku partai yang berkuasa (pemerintah).⁷

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan masalah penelitian tersebut di atas, pertanyaan penelitiannya adalah:

1. Apa yang melandasi para ilmuwan politik memilah ideologi partai politik di Indonesia? Apakah ada perubahan ideologi partai politik masa Demokrasi Reformasi dibandingkan masa sebelumnya?
2. Bagaimana bentuk peran partai politik di Indonesia? Apa perubahan dan kesinambungan peran partai politik masa Demokrasi Reformasi dibandingkan masa sebelumnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk merentangkan dasar para Ilmuwan memilah ideologi partai politik di Indonesia.
2. Untuk memotret model bentuk peran partai politik di Indonesia.

^{7 7} Nazaruddin Sjamsuddin dkk, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 1998, hal. 5.11-5.12.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan.

Bab ini memuat kerangka dasar penelitian. Bab ini merupakan kerangka dasar penelitian yang menguraikan, latar belakang masalah, masalah penelitian dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II. Kerangka Teori. Bab ini memberi gambaran tentang landasan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini mencakup konsep ideologi dan konsep partai politik.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini pada dasarnya berusaha memberikan gambaran mengenai metode dan prosedur yang digunakan dalam proses penelitian. Pokok bahasan dalam bab ini mencakup pendekatan penelitian, sumber data, dan analisis data.

Bab IV Hasil dan Analisis Penelitian . Bab ini pada dasarnya gambaran mengenai hasil penelitian dan analisis hasil penelitian. Pembahasan mencakup, Pemilahan ideologi partai dan peran partai politik di Indonesia.

BAB V Penutup. Bab ini menguraikan kesimpulan penelitian dan temuan penelitian. Bagian kesimpulan pada intinya menjawab pertanyaan penelitian. Temuan penelitian merupakan temuan dari hasil analisis penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Ideologi

Deliar Noer, ideologi merupakan suatu keyakinan dalam kehidupan manusia, dan manusia hidup dengan keyakinannya tersebut.⁸ Ciri-ciri suatu ideologi yaitu, merupakan cita-cita yang dalam dan luas, bersifat jangka panjang, bersifat universal atau diyakini bersifat universal. Ideologi merupakan milik suatu kelompok manusia yang dapat mengidentitaskan dirinya dengan isi ajaran tersebut. Ideologi juga mengikat kelompok, sering pula membenarkan dan mempertahankan sikap perbuatan kelompok. Ideologi juga memajukan kepentingan kelompok sesuai dengan dasar ajaran yang dianut, tidak perlu kelompok itu merupakan orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang pandai, termasuk tentang isi ideologi itu sendiri. Ideologi juga dapat memilih alternatif prioritas, masa yang hendak didahulukan dan mana yang akan dikemudiankan. Ideologi sebagai sumber dari program yang direncanakan, karena ia memang diperlukan untuk kriteria bandingan atau penilaian. Ideologi merupakan sumber penggerak, dasar landasan untuk bertolak, tapi juga merupakan tujuan yang hendak dicapai. Ideologi merupakan cita-cita, bukan kenyataan, dan ideologi merupakan pedoman dalam berprogram.⁹ Ideologi merupakan sistem nilai dan norma, dan cita-cita yang ingin dicapai partai politik berupa nilai demokrasi, kebangsaan, dan agama. Ideologi ini menjadi identitas partai politik yang membedakannya dengan partai lainnya.¹⁰

⁸ Deliar Noer, *Op.Cit*, hal.31

⁹ *Ibid*, hal 33.

¹⁰ Lili Romli, *Masalah Kelembagaan Partai Politik di Indonesia*, Jurnal Penelitian Politik , Vol 5, No.1, 2008, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesi (LIPI), hlm. 26.

Pemahaman tentang pengertian ideologi dapat membantu menganalisis ideology yang dianut partai politik di Indonesia masa Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, demokrasi pancasila dan Demokrasi Reformasi.

B. Pengertian Partai Politik

Pengertian partai politik dalam pembahasan ini mencakup pengertian partai politik, fungsi, sistem dan tujuan. Miriam Budiardjo mengemukakan pengertian partai politik sebagai berikut:

“Partai politik yaitu suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstiusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka¹¹”.

Rusadi Kantaprawira mengartikan partai politik sebagai organisasi manusia dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi, mempunyai program, politik sebagai rencana pelaksanaan atau cara mencapai tujuan secara pragmatis menurut tahapan jangka dekat sampai yang jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa.¹²

Presiden Soekarno, partai politik merupakan sarana menjaga persatuan nasional. Presiden Soekarno pernah menggagas sistem kepartaian di Indonesia cukup satu partai yakni Parai Nasional Indonesia. Gagasan Presiden Soekarno ini tidak disetujui anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Partai politik yang begitu banyak tidak kondusif dalam menjaga persatuan bangsa. Pengalaman menunjukkan, pemerintahan tidak pernah stabil karena adanya oposisi dari partai politik yang tidak ikut atau keluar dari koalisi partai di Kabinet. Presiden Soekarno, membuat gagasan yakni menjadikan partai politik berada di bawah kekuasaanya, dengan jalan memasukkan anggota partai yang menjadi anggota

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1981, hal. 160-161.

¹² Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 66.

parlemen merangkap menjadi Menteri di Kabinetnya yang disebut Kabinet Gotong-Royong. Sebagaimana dikatakannya:

“Konsepsi saya mengenai merasionalkan partai politik, tidak pandang bulu lagi tidak menanyakan lagi apakah engkau Masyumi-kah, engkau PKI-kah, engkau NU-kah, engkau PNI-kah, engkau Protestan-kah, engkau Katolik-kah. Tidak. Semua partai yang ada di dalam parlemen, diberi hak untuk ikut duduk dalam Kabinet yakni Kabinet gotong-royong. Sekian anggota partai dalam parlemen, sekian Menteri di dalam Kabinet. Partai-partai yang kecilpun mempunyai kesempatan duduk di dalam Kabinet meski dalam bentuk Wakil Menteri.¹³

Wakil Presiden Mohammad Hatta, partai politik merupakan alat untuk menyusun pendapat umum secara teratur, agar supaya rakyat belajar merasa bertanggung jawab sebagai pemangku negara dan sebagai anggota masyarakat.¹⁴

Presiden Soeharto, partai politik merupakan wadah penyaluran aspirasi-aspirasi yang rakyat dan sarana pembinaan kesadaran politik masyarakat. Dengan demikian partai politik bukan sekedar alat untuk memperoleh pengikut sebanyak-banyaknya saja, bukan sekedar alat memenangkan pemilihan umum, bukan sekedar alat untuk memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan. Partai politik dan organisasi sosial politik lainnya harus mempunyai semangat dan berorientasi yang sesuai dengan pembangunan bangsa. Dalam sistem Demokrasi Pancasila, partai politik dan Golkar mempunyai hak hidup.¹⁵

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (UU No. 31 Tahun 2002) memberikakan batasan tentang partai politik yang tercantum di dalam Pasal 1 yang menyatakan partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

¹³ (Herbert Feith dan Lance Castle 1988; 69-70)

¹⁴ (Sri Edi Swasono & Fauzi Ridjal, 1992; 115)

¹⁵ Krissantono (ed), *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila*, Jakarta: CSIS, 1976*ibid*, hal, 65-67.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (UU No. 3 Tahun 1975) pengertian tentang partai politik dan Golongan Karya tercantum pada terdapat pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan:

Partai Politik dan Golongan Karya sebagai organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga negara Republik Indonesia atas dasar persamaan kehendak , mempunyai kedudukan , fungsi hak dan kewajiban yang sama sederajat sesuai dengan Undang-undang ini dan kedaulatannya berada di tangan anggota.”

Merujuk pada pengertian-pengertian partai politik tersebut di atas, maka partai politik adalah suatu kelompok yang membentuk organisasi dan memiliki anggota yang dilandasi oleh cita-cita yang sama dan ikut berperan dalam memperoleh kekuasaan melalui pemilihan umum (Pemilu).

C. Tujuan Partai Politik

Miriam Budiardjo tujuan partai politik untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstiusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada pengertiannya mengenai partai politik. Rusadi Kantaprawira menjelaskan beberapa tujuan partai politik yaitu: 1) berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam artian mendudukan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah, serta dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik atau output pada umumnya; 2) berusaha melakukan pengawasan, bahkan oposisi bila perlu, terhadap kelakuan, tindakan, kebijaksanaan para pemegang otoritas; 3) berperan untuk dapat memandu tuntutan-tuntutan yang masih mentah, sehingga partai politik bertindak sebagai penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu-isu poitik yang dapat dicerna dan diterima oleh masyarakat.¹⁶

¹⁶ Rusadi Kantaprawira , *Op.Cit*, hal. 66-67.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 22 Agustus 1945 merumuskan tujuan partai politik dimuat pada poin 2 dan 3 menyatakan:

“2. Tujuan partai adalah: Negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, berdasarkan kedaulatan rakyat. 3. Usaha untuk mencapai tujuan itu ialah: a. memperkuat persatuan Bangsa dan Negara b. Memperbesar rasa cinta, setia dan bakti kepada Tanah-Air; c. mengikhtiarkan program ekonomi dan sosial seperti di bawah ini: 1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas gotong royong. 2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; 3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4) Fakir –miskin dan anak-anak yang terlantr dipelihara oleh negara 5). Hak tiap-tiap Warga Negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. d. Membantu tercapainya keadilan sosial dan perikemanusiaan dengan jalan perdamaian Internasional.¹⁷”

UU No. 3 Tahun 1975 menjelaskan tentang tujuan partai politik dan Golongan Karya pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan:

“Tujuan Parai Politik dan Golongan karya adalah: a. mewujudkan cita-cita Bangsa seperti dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945; b. menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata spritual dan material berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam negara Kesatuan Republik Indonesia; c. mengembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila.”

UU No. 31 Tahun 2002 merumuskan tujuan partai politik menjadi tujuan umum partai politik dinyatakan pada Pasal 6 ayat (1) dan tujuan khusus partai politik dinyatakan pada Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).

“Pasal 6 ayat (1) menyatakan: Tujuan umum partai politik adalah: a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara kesatuan Republik Indonesia; dan c. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayat (2) menyatakan Tujuan khusus partai politik adalah mmperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat

¹⁷ (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 998; 628).

(3) Tujuan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.”

Tujuan utama partai politik adalah memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota-anggota dan rakyat secara umum kepada lembaga legislatif dan eksekutif untuk dirumuskan dalam kebijakan. Tujuan partai politik lainnya yakni berusaha memperoleh jabatan-jabatan politik pada lembaga eksekutif dan menguasai badan legislatif melalui Pemilu.

D. Fungsi Partai Politik

Partai politik memiliki beberapa fungsi. Daniel Sparringa (2007,200:xxvii) fungsi partai politik adalah sebagai lembaga utama yang menjaga dan memelihara demokrasi. Melalui demokrasi, perbedaan gagasan dan faham yang ditimbulkan oleh perbedaan ideologi, etnisitas, agama, gender, dan kelas, dapat dikelola secara damai, tanpa kekerasan. Fungsi partai politik lainnya adalah memperjuangkan nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan multikulturalisme menjadi bangunan dasar sebuah masyarakat.¹⁸

UU No. 31 Tahun 2002 merumuskan mengenai fungsi partai politik yang termuat pada Pasal 7 yang menyatakan:

“Partai politik berfungsi sebagai sarana: a. pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. b. penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat; c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; d. partisipasi politik warga negara; dan e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

¹⁸ Daniel Sparringa, “Transisi Demokrasi di Indonesia Menstrukturkan sebuah Peta Jalan Baru”, dalam Akbar Tandjung, *The Golkar Way Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2007, hal. xxvii.

Merujuk pada pembahasan fungsi partai politik tersebut di atas, fungsi utama partai politik yaitu pertama, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat baik masyarakat yang menjadi pendukung utamanya maupun masyarakat di luarnya. Fungsi ini berkaitan dengan tujuan didirikannya partai politik yakni untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat menjadi kebijakan.

Kedua fungsi rekrutmen politik, partai politik berfungsi menyeleksi calon-calon yang akan menduduki jabatan pada lembaga eksekutif dan eksekutif. Fungsi ini menjadi penting, karena partai politik yang memiliki fungsi mencalonkan anggota-anggota masyarakat yang menduduki posisi tersebut di atas melalui Pemilu. Partai politik memiliki mekanisme yang terlembaga dalam proses rekrutmen dan memiliki jaringan secara organisasi untuk memenangkan calon-calon yang diajukannya. Ketiga fungsi pengatur konflik yakni fungsi partai politik untuk mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat, konflik internal partai, konflik antar partai, dan konflik masyarakat dengan pemerintah agar tidak menjurus ke arah ketidaktertiban dalam aktifitas masyarakat, aktifitas berbangsa dan bernegara. Partai politik memiliki struktur organisasi dan jaringan sampai ke daerah-daerah. Keberadaan jaringan partai politik yang demikian, memungkinkannya melaksanakan fungsi mencegah konflik yang berkembang dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara.

E. Sistem Kepartaian

Rusadi Kantaprawira membedakan sistem kepartaian menjadi 3 (tiga) yaitu sistem multi-partai (*Multy party system*), sistem dua-partai (*Two party system*), dan sistem satu-partai (*One party system*). Sistem multi-partai yakni manakala mayoritas mutlak dalam lembaga perwakilan rakyat dibentuk atas dasar kerja sama dua kekuatan atau lebih. Sistem dua-partai yakni bilamana mayoritas mutlak dalam lembaga perwakilan rakyat selalu dikuasai oleh kekuatan politik terbesar secara

bergantian menurut hasil Pemilu. Sistem satu-partai yakni dimana dalam lembaga legislatif hanya terdapat satu- partai yang menguasai mayoritas secara terus-menerus.¹⁹

Riswandha Imawan, Indonesia pada masa sistem politik Demokrasi Parlementer khususnya pada Pemilu 1955, menggunakan sistem multi-partai (*multy party system*).²⁰ Pengertian sistem multi-partai apabila pengambilan keputusan di lembaga legislatif atau DPR, harus ada kerjasama antara 2 (dua) atau lebih partai politik melalui fraksi-fraksinya di DPR. Karena dari perolehan kursi di DPR, tidak satupun partai politik yang memperoleh kursi sampai mencapai di atas 50%. Pengertian sistem partai hegemonik, meskipun terdapat lebih dari dua partai politik yang memperoleh kursi di DPR, tetapi satu partai politik mampu membuat keputusan politik, tanpa berkerjasama dengan partai-partai lainnya karena jumlah kursinya di DPR lebih dari 50% dalam jangka waktu yang lama.

Sistem kepartaian di Indonesia pada masa Orde Baru, termasuk katgori sistem kepartaian hegemonik (*Hegemonic party system*).²¹ Ciri sistem ini adalah realitas terdapat lebih dari dua partai politik, hanya satu partai politik yang secara terus menerus menguasai mayoritas mutlak di parlemen.

Lance Castles, sistem kepartaian Indonesia pada masa sistem politik reformasi menganut sistem multi-partai yang berimbang. Cirinya adalah jumlah partai politik yang memperoleh sura yang signifikan sepanjang Pemilu masa Reformasi yakni 5-6 partai politik. Sistem kepartaian tersebut menciptakan iklim politik yang sangat kompetitif dimana setiap partai politik mampu bersaing dan memenangkan persaingan dalam Pemilu dan pasca-Pemilu. Implikasi dari model sistem kepartaian politik Indonesia yang demikian adalah meskipun memenangkan Pemilu,

¹⁹ Rusadi Kantaprawira, *Op.Cit*, hal. 70-73.

²⁰ Riswandha Imawan, Riswandha Imawan," Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan di Indonesia", dalam Reza Noer Arfani (ed) *Demokrasi Indonsia Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996, hal. 168-169.

²¹ Riswandha Imawan, *Op.Cit*, hal. 169.

menghendaki adanya kerjasama atau koalisi dalam pemerintahan.²²

F. Peran Partai Politik

Ramlan Surbakti membagi peran partai politik menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai wadah perjuangan ide (*representation of ideas*), sebagai penyelenggaraan negara, dan sebagai pelembagaan konflik. Peran partai politik sebagai wadah perjuangan adalah partai politik mencerminkan suatu cita-cita tentang masyarakat dan negara yang dikehendaki bersama atau ideologi. Peran partai politik untuk memperjuangkan ideologi yang seharusnya menjadi motivasi dan penggerak utama kegiatan partai politik. Peran partai politik bersama-sama anggotanya secara bersama-sama untuk mewujudkan ideologi tersebut.²³

Peran partai politik dimaksud dalam studi ini yaitu sebagai penyalur aspirasi rakyat, sebagai rekrutmen politik dan sebagai pengatur konflik. Peran partai politik sebagai penyalur aspirasi rakyat, partai berperan menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas rakyat. Peran partai politik sebagai rekrutmen politik yakni berperan dalam proses pencalonan anggota yang akan mengisi jabatan legislatif, eksekutif, dan Yudikatif. Peran partai politik sebagai pelembagaan konflik, partai politik berperan mengatur dan menyelesaikan konflik pada dirinya sendiri secara fair dan mengatur dan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat.

²² Lance Castles, "Partai" dalam, Hairus Salim (Penyunting), *Tujuh Mesin Pendulang Suara*, Yogyakarta, LKiS, 1999, hal, xiii-ix.

²³ Ramlan Surbakti, "Perkembangan Partai Politik di Indonesia", dalam Andy Ramses M & La Bakry (ed), *Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Masyarakat Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI), 2009, hal. 139-142.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam *setting* tertentu yang ada dalam kehidupan riil dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena apa yang terjadi dan bagaimana terjadinya.²⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan. Pertama, penelitian ini menekankan pemahaman terhadap fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam.²⁵ Kedua, penelitian ini tanpa bertujuan menguji hipotesis. Ketiga, penelitian ini tidak menggunakan prosedur analisis statistik. Tipe penelitian ini bersifat dekriptif-analitis yakni tipe penelitian yang berusaha menggambarkan realitas sosial yang kompleks melalui penyederhanaan dan klasifikasi dengan memanfaatkan konsep-konsep yang bisa menjelaskan suatu gejala sosial secara analitis.²⁶

B. Sumber Data

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yakni sejumlah informasi yang diperoleh melalui penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis, berupa data-data yang bersumber dari dokumen terutama risalah pembahasan, buku-buku, disertasi, tesis, jurnal, majalah, koran dan media internet.

²⁴ Saifuddin Zuhri Qudsi, Pengantar Bayang-Bayang Agenda Revolusioner Penelitian Kualitatif, dalam Norman K. Denzim dkk (ed), *The Sage HandBook of Qualitative Research*, edisi ketiga, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. vxiii.

²⁵ Lexi J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, hal, 31.

²⁶ J. Vredembregt, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, 1983, hlm. 34-35.

C. Analisa Data

Analisa data pada dasarnya mengatur urutan data yang akan disajikan, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagori dan satuan uraian dasar yang sudah digariskan. Analisa data kualitatif biasanya dapat dilakukan dalam proses pengumpulan data, tapi analisa data yang intensif dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Analisa data penelitian ini dilaksanakan dalam empat tahap yaitu tahap pengecekan data, tahap pengkatagorian data dan tahap penafsiran data, dan tahap kesimpulan.

Pertama, tahap pengecekan data. Pengecekan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi. Menurut Lexi J. Moleong, triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²⁷ Tehnik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah setelah data diperoleh melalui kepustakaan dan wawancara dilakukan pengecekan satu sama lainnya. Misalnya data hasil wawancara dengan nara sumber yang satu akan dicek dengan data-data dengan nara sumber lainnya. Data hasil wawancara juga akan dicek dengan data yang berasal dari studi pustaka. Hal ini dimaksudkan agar penyajian data dalam penelitian ini betul-betul akurat. *Kedua*, tahap pengkatagorian atau pengklafikasian data. Dalam tahap ini data-data yang sudah dicek, kemudian diklasifikasi atau dikatagori menurut urutan pembahasan dalam penelitian *Ketiga*, tahap penafsiran data. Pada tahap ini dilakukan penafsiran atau pemberian makna yang signifikan terhadap data yang diklasifikasi dan dicari hubungannya satu sama lain. *Keempat*, tahap pengambilan kesimpulan dan implikasi teori. Pada tahap ini dilakukan pengambilan kesimpulan terhadap data dan fenomena yang sudah disusun untuk menjawab pertanyaan penelitian.

²⁷ *Ibid*, hal. 330-331.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini membahas masalah partai politik di Indonesia. Pembahasan meliputi dua pokok bahasan yaitu pertama, membahas tentang ideologi partai politik. Kedua, peran partai politik di Indonesia. Pembahasan mencakup masa Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Reformasi.

A. Pemilahan Ideologi Partai Politik

Para ilmuwan politik memiliki berbagai macam pemilahan tentang ideologi partai politik di Indonesia, dengan berbagai dasar yang digunakan dalam membuat pemilahan. Daniel S. Lev, memilah partai politik di Indonesia berdasarkan kelompok suku bangsa atau etnik kedaerahan yaitu Partai politik Jawa dan partai politik luar Jawa. Kelompok partai politik Jawa adalah partai politik banyak diinspirasi dan dilandasi kepentingan pandangan hidup Jawa, dan memiliki basis dukungan berasal dari Jawa khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Partai politik Jawa ini yaitu PNI, PKI, dan NU. Pada pemilu 1955, PNI memperoleh 65,5% suara, PKI memperoleh 74,9%, dan NU memperoleh 73,9% di wilayah tersebut. Partai politik luar Jawa adalah partai politik memiliki ciri Islam yang kuat dan memiliki basis dukungan berasal dari luar Jawa, yang termasuk partai politik ini yakni Masyumi.²⁸

Deniel S. Lev memilah ideologi partai politik berdasarkan sosial keagamaan, berdasarkan pemilahan masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh Geertz yaitu Islam *Santri*, Islam *Abangan* dan *Priayi*. S. Lev memilah partai politik di Indonesia menjadi partai politik *santri*, partai politik *abangan* dan partai politik *priayi*. Partai politik *santri* adalah partai politik yang memiliki basis dukungan berasal dari *santri*,

²⁸ Daniel S Lev, "Partai-Partai Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Parlementer (1950-1957) dan Demokrasi Terpimpin (1957-1965)", dalam Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta: Tiara wacana Yogya, 1996, hal. 135-136.

termasuk partai ini yaitu Masyumi dan NU. Masyumi mendapat dukungan dari kalangan Islam Modernis seperti Muhammadiyah, dan NU memperoleh basis dukungan berasal dari kalangan Islam tradisonal. Partai politik *abangan* adalah partai politik yang memperoleh dukungan berasal dari kalangan Islam *abangan*, termasuk partai politik ini yakni PKI. Partai politik *priayi* adalah partai politik yang memiliki basis dukungan berasal dari para pegawai atau aparat pemerintahan, termasuk partai ini yakni PNI.²⁹

Herbert Feith mengelompokkan ideologi partai politik di Indonesia berdasarkan aliran pemikiran politik yang berkembang di Indonesia yaitu, Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokrasi, dan Komunisme. Partai politik yang dipengaruhi pemikiran politik Komunisme yakni PKI, Partai politik yang dipengaruhi pemikiran politik Nasionalisme Radikal yakni PNI. Partai politik yang dipengaruhi aliran pemikiran politik tradisionalisme Jawa yakni Partai Indonesia Raya. Partai politik yang dipengaruhi aliran pemikiran politik Islam yaitu Masyumi dan NU. Partai politik yang dipengaruhi aliran pemikiran politik Sosialisme Demokrasi yakni PSI. Setiap partai politik dapat dipengaruhi lebih dari satu aliran, PNI selain dipengaruhi pemikiran Nasionalisme Radikal, juga dipengaruhi oleh pemikiran Tradisional Jawa. Masjumi dan NU selain dipengaruhi pandangan ajaran agama Islam juga dipengaruhi oleh pemikiran Sosial Demokrat. Menurut Herbert Feith, masa Orde Baru pengaruh aliran Tradisionalisme Jawa dan Sosialisme Demokrat mengalami modifikasi, berganti dengan aliran Developmentalis Integralis yakni Golkar. Menurut Herbert Feith partai politik yang menganut aliran pemikiran politik Islam dan aliran pemikiran politik Nasionalisme akan tetap berperan dalam mewarnai perpolitikan di Indonesia.³⁰

Nazaruddin Sjamsuddin memilah ideologi partai politik di Indonesia menjadi Nasionalisme, Sosialisme, Sosialisme Trotsky, Islam aliran Tradisional, Islam aliran Modernis, Islam aliran Modernis Sosialis. Partai politik yang menganut ideologi

²⁹ *Ibid* , hal 134-138.

³⁰ Herbert Feith & Lance Castles (ed), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta:LP3ES, 1988, hal. xxv-xxii.

nasionalisme diwakili oleh PNI, partai politik yang menganut ideologi sosialisme diwakili PSI, partai politik yang menganut ideologi sosialisme Trotsky diwakili Partai Murba, partai politik yang menganut ideologi aliran Islam tradisional diwakili NU, dan partai politik yang menganut aliran Islam Modernis diwakili partai Masjumi, dan partai politik yang beraliran Islam modernis sosialis diwakili Partai Serikat Islam.³¹

Valina Singka Subekti mengelompokan ideologi partai politik menjadi Islam, Nasionalis, Nasionalis Pembangunan, dan Nasionalis Religius. Partai politik yang termasuk menganut ideologi Islam yaitu F-PPP, F-PKS, F-PBR. Partai politik yang menganut ideologi Nasionalis yaitu F-PDIP dan F-PD, Partai politik yang menganut ideologi Nasionalis Pembangunan yakni Partai Golkar. Partai politik yang menganut ideologi Nasionalis Religius berbasis Islam yaitu F-PAN, F-PKB, F-BPD. Partai politik menganut ideologi Nasionalis Religius berbasis non-Islam yakni F-PDS.³²

Kevin R. Evans, memilah partai politik berdasarkan Ideologi dan budaya politik . Pengelompokan partai politik berdasarkan Ideologi, memilah partai politik menjadi partai politik Sekuler dan partai politik Islamis. Partai politik sekuler yakni partai-politik berdasarkan nilai-nilai kebangsaan dan netral dari pengaruh agama dalam landasan perjuangannya. Partai politik Islamis yakni partai politik berdasarkan nilai-nilai agama Islam dalam landasan perjuangannya. Pada pemilu 1955, kelompok partai politik yang berideologi Sekuler yaitu PKI dan PNI. Partai politik yang berideologi Islamis yaitu Masjumi dan PNU. Pada masa reformasi, partai politik yang berideologi sekuler yakni PDI-P. Partai politik yang berideologi Islamis yaitu PKS, PPP, dan PAN. Partai Golkar dan PKB dikelompokkan menjadi partai politik Sekuler-Islamis atau kelompok tengah. Partai ini meskipun bersifat kebangsaan, namun tidak mengabaikan nilai-nilai agama Islam dalam perjuangannya.³³

³¹ Nazaruddin Sjamsuddin dkk, *Op.Cit*, hal. 5.5.

³²Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hal. 94.

³³ Kevin R. Evans, " Pola Partai politik di Indonesia" dalam Andy Ramses & La Bakry (ed), *Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: MIPI, 2009, hal. 160-164.

Kevin R. Evans mengelompokkan partai politik Indonesia berdasarkan refleksi budaya politik. Berdasarkan dasar tersebut mengelompokkan partai politik menjadi partai politik Elitis dan partai politik Populis. Partai politik Elitis memandang keterikatan massa dengan partai berdasarkan proses politik dan posisi kebijaksanaan, sementara identifikasi dan loyalitas pribadi kepada pemimpin nasional kurang penting. Partai politik Populis keterikatan massa dengan pemimpin partai bersifat emosional, loyalitas kepada Pimpinan Pusat Partai bersifat pribadi. Kelompok partai politik Elitis yaitu PAN, PKS, partai politik yang termasuk kelompok Populis yaitu PKB dan Partai Golkar. Partai politik termasuk kategori Elitis-Populis yaitu PDIP dan PPP.³⁴

Kevin R. Evans memilah partai politik di Indonesia berdasarkan geografis Jawa-luar Jawa dan Kota-Desa berdasarkan basis dukungan. Partai politik Jawa-Desa adalah partai politik yang memiliki basis dukungan berasal dari Pulau Jawa dan desa-desa adalah PKB, Partai politik Jawa-Kota yakni partai politik yang memiliki basis dukungan dari luar pulau Jawa dan daerah perkotaan adalah PBB. Partai politik Luar Jawa-Kota –Jawa- Luar Jawa adalah partai politik yang memiliki basis dukungan berasal dari pulau Jawa, luar Jawa pulau Jawa, dan kota yakni PAN. Partai politik Luar Jawa - Kota-Desa adalah partai yang memiliki basis dukungan berasal dari luar pulau Jawa, kota, dan desa yakni Partai Golkar. Partai politik Jawa-luar Jawa dan Kota-Desa adalah partai politik yang memiliki basis dukungan berasal dari pulau Jawa, luar pulau Jawa, kota, dan desa yaitu PDIP dan PPP.³⁵

Daniel Dhakidae memilah ideologi partai politik ke dalam dua jalur utama yaitu jalur kelas dan jalur aliran. Berdasarkan jalur kelas membedakan partai politik menjadi partai politik Pembangunanisme (*Developmentalisme*) dan partai politik Sosialisme Radikal. Partai politik Pembangunanisme memiliki ciri berpihak pada pemodal, internasional dan domestik, yang termasuk kelompok ini yakni Partai Golkar. Partai politik Sosialisme Radikal bercirikan perjuangan berpihak pada kaum

³⁴ *Ibid*, hal. 162-164.

³⁵ *Ibid*, hal. 164-167.

kelas bawah (buruh), yang termasuk kelompok ini yakni Partai Rakyat Demokratik (PRD).³⁶

Pemilahan partai politik berdasarkan aliran, memilah ideologi partai politik menjadi 2 (dua) yaitu partai politik Agama dan partai politik Kebangsaan. Partai politik Agama khususnya agama Islam yakni yakni PPP. Partai politik yang berdasarkan Kebangsaan yakni PDI-P. Pengelompokan partai politik lainnya adalah kelompok partai Tengah yakni partai politik yang bersentuhan dengan Sosialisme, Agama dan Kebangsaan yaitu PAN, PKB dan PUDI.³⁷

Sigit Pamungkas, memilah ideologi partai dalam sistem politik di Indonesia menjadi Partai Nasionalis, Partai Programatik, Partai berbasis Agama, Partai Kelas, Partai politik Pseudo Agama, dan Partai Etnis dan Kedaerahan. Partai Nasionalis pada umumnya berusaha memisahkan nilai-nilai agama dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai Programatik pada umumnya tidak mendasarkan diri pada ideologi tertentu secara ketat, partai politik ini lebih berorientasi pada program. Partai berbasis Agama pada umumnya berusaha memperjuangkan dan memasukkan nilai-nilai agama dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai berbasis Agama dipilah menjadi partai politik berbasis agama Islam dan partai politik berbasis Agama non-Islam. Partai politik berbasis Kelas lebih berusaha membangkitkan pandangan dan pemikiran tentang kesadaran kelas sosial. Partai politik Pseudo Agama merupakan partai politik mengandalkan basis sosial dari kelompok agama dan bersifat terbuka untuk penganut agama yang berbeda. Partai berbasis Etnis dan Kedaerahan merupakan partai politik yang berusaha memperjuangkan kepentingan daerah dan etnisnya.³⁸ Pemilahan Partai politik berdasarkan ideologi tersebut dapat dilihat pada Tabel.

³⁶ Daniel Dhakidae (ed), *Partai Politik Indonesia Ideologi dan Proram 2004-2009*, Jakarta: PT Kompas, 1999, hal. 34.

³⁷ *Ibid*, hal. 36.

³⁸ Sigit Pamungkas, *Op.Cit*, hal. 113-143.

Tabel 2
Pemilahan Partai Politik di Indonesia Berdasarkan ideologi

Ideologi Partai	Demokrasi Parlementer	Orde Baru	Reformasi
Nasionalis	PNI	PDI	PDIP
Programatik	-	Golkar	Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Gerindra
Berbasis Agama Islam	Masyumi, Partai NU, PSII, Perti, PPTI, AKUI	PPP	PPP, PBB, PKS, PBR, PUI, PSII, PIB, Masymi
Berbasis Agama non-Islam	Parkindo, Partai Katolik	Parkindo, Partai Katolik (sebelum Fusi)	PDKB, Krisna, PDS, PKDI
Berbasis Kelas	PKI	-	-
Pseudo Agama	-	-	PKB, PAN
Etnis Kedaerahan	Gerindra Yogyakarta, Partai Persatuan Daya Kalimantan Barat, AKUI Madura, Partai rakyat Desa Jawa Barat, Partai Rakyat Indonesia Merdeka Jawa Barat, Partai Pilihan rakyat Sunda Jawa Barat, Persatuan Indonesia Raya NTB Lombok	-	-

Sumber: diolah dari Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Institute For Democracy (IDW), 2011, hal. 113-143.

Pemilahan ideologi partai politik para ilmuwan politik sebagaimana uraian tersebut di atas, pada umumnya berdasarkan pada nilai agama, budaya dan geografi. Pemilahan ideologi yang mengemukakan adalah pemilahan ideologi nasionalis, Ideologi Islam beraliran modernis dan ideologi Islam beraliran tradisional. Partai politik yang menganut ideologi nasional menguat pada PDIP kemudian diikuti oleh Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra dan partai Nasdem. Partai menganut ideology aliran islam modernis lebih menguat pada PAN. Partai politik beraliran islam tradisional menguat pada PKB dan PPP.

Ideologi partai politik di Indonesia Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Reformasi tidak ditemukan perubahan yang signifikan. Partai politik yang ada, meskipun menggunakan

symbol-simbol yang berbeda, namun dari aspek basis dukungan pemilih yang ada menunjukkan ketiga ideologi dimasuk masih sangat dominan. Proses politik yang terjadi, partai-partai politik yang menganut ideologi nasionalisme dan partai-partai politik Islam yang menganut aliran Islam modernis akan tetap mewarnai dinamika kepolitikan di Indonesia masa lalu, sekarang dan masa mendatang..

B. Peran Partai Politik Dalam Sistem Politik Indonesia

Peran partai politik pada dasarnya sebagai wadah perjuangan aspirasi dan kepentingan rakyat, rekrutmen politik, dan mengelola konflik. Partai politik dalam sistem politik Indonesia ikut memainkan perannya dalam dinamika politik Indonesia semenjak sistem Demokrasi Parlementer (1949-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Demokrasi Pancasila (1965-1998), dan masa Demokrasi Reformasi (1998-sekarang), dengan tingkatan yang berbeda-beda.

Peran partai politik sebagai penyalur aspirasi rakyat pada masa sistem Demokrasi Parlementer, belum berjalan secara optimal. Partai politik hanya memainkan peran sebatas mengemukakan isu-isu politik yang menjadi perhatian rakyat pada masa kampanye Pemilu. Tujuannya untuk mencari dukungan rakyat guna memperoleh suara rakyat. Partai politik pada masa ini juga digunakan sebagai instrumen perjuangan politik, sehingga terjadi perebutan kursi atau jabatan yang membuat pemerintahan tidak bisa bertahan lama dan berganti-ganti kabinet.³⁹

Peran partai politik menjalankan fungsi rekrutmen politik sangatlah besar, semua calon eksekutif (Perdana Menteri) dan Menteri Kabinet, calon anggota legislatif (DPR) berasal dari kader-kader partai politik. Peran partai politik yang besar pada masa ini, karena didukung oleh kebijakan pemerintah melalui Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 Nopember 1945. Kebijakan ini pada dasarnya

³⁹ Lili Romli, *Problematisasi Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*, Orasi pengukuhan Profesor Riset Bidang Politik dan Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 20 Desember 2017, hal. 1-2.

menghendaki masyarakat membentuk partai politik sebagai wadah peranserta rakyat dalam mengisi kemerdekaan.

Peran partai politik sebagai pengatur konflik termasuk rendah. Partai politik pada masa ini belum berperan untuk menyelesaikan konflik yang ada, yang terjadi adalah sesama partai politik sulit mencapai kompromi sesama mereka. Kasus pada Sidang di Konstituante, partai-partai menyelesaikan perbedaan mengenai rumusan dasar negara, akibatnya badan Konstituante di bubarkan Presiden Soekarno melalui sebuah Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959.

Fakta lainnya adalah partai politik pada masa ini, kesulitan untuk membangun koalisi untuk membentuk suatu pemerintah yang akan memperoleh dukungan oleh suara terbanyak di dalam Dewan Perwakilan Rakyat, terutama antara Masyumi dengan PNI dan NU. Akibatnya terjadi krisis Kabinet, karena partai politik yang tidak sepaham menarik dukungannya dari Kabinet Sebagaimana dikemukakan Wakil Presiden Mohammad Hatta:

“... Sesudah pemilihan umum tahun 1955 jumlah partai tidak berkurang, malahan bertambah menjadi 28. Tiap-tiap Pemerintah mempunyai corak pemerintah koalisi, tersusun sedikitnya 7 atau 8 parta. Alangkah sulitnya menyusun program bersama dan menyetujui orang-orang yang akan duduk sebagai Menteri, Kalau Pemerintah sudah berjalan dan ada partai dalam koalisi itu yang tidak mendapat kepuasan, lalu ia menarik Menterinya keluar, maka timbullah krisis Kabinet. Kabinet jatuh karena kelamahan dari dalam, bukan karena *votum* tidak percaya dari dari Parlemen. Akibatnya Pemerintah tidak cukup mempunyai kesempatan untuk memikirkan soal ekonomi dan pembangunan yang sudah disusun. Pemerintah baru memikirkan lagi rencana baru.” Antara Masyumi dengan PNI dan NU sukar menyesuaikan paham, pada hal 3 partai ini memperoleh suara terbanyak mutlak di dalam Dewan Perwakilan Rakyat.”⁴⁰

⁴⁰ Sri Edi Swasono & Fauzi Ridjal, *Op.Cit*, hal. 114-115.

Tabel 3
Peran Partai Politik Masa Demokrasi Parleментар

Peran	Katagori
Penyalur Aspirasi Rakyat	Rendah
Rekrumen Politik	Tinggi
Pengatur Konflik	Rendah

Kelemahan partai-partai politik pada masa ini adalah partai politik dijadikan alat oleh elite partai politik untuk tujuannya, dan mengabaikan tujuan partai politik yang utama yakni membangun negara bangsa.⁴¹ Kelemahan partai politik lainnya adalah masih terdapat perbuatan menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*), kekuasaan tidak berada pada pemerintah, tetapi berada pada partai politik, akibatnya pemerintah menjadi orang suruhan partai. kelemahan partai politik lainnya adalah partai politik menggunakan kekuasaannya untuk memperoleh uang dan membagi rejeki untuk kepentingan partai. merupakan kelemahan partai politik lainnya pada masa ini. Sebagaimana dikatakannya:

“...praktek hidup kepartaian menetapkan suatu yang ganjil, bahwa kekuasaan yang sebenarnya tidak pada yang memerintah dengan bertanggung jawab, melainkan pada dewan partai yang tidak bertanggung jawab. Dengan praktek seperti itu, Pemerintah diturunkan derajatnya jadi orang suruhan partainya. Akibat dari itu pula ialah, bahwa pemimpin-pemimpin yang paling terkemuka di dalam partai tidak duduk di dalam Kabinet. Untuk menjadi anggota Pemerintah ditunjuk orang yang tidak terlalu terkemuka, malahan adakalanya tokoh kelas dua atau kelas tiga, dengan tidak mempunyai pengetahuan istimewa tentang jabatan yang ditugaskan kepadanya.”⁴²

“Partai dalam menjalankan demokrasi masih terdapat perbuatan penyalahgunaan kekuasaan. Bagi beberapa golongan menjadi partai pemerintah berarti “membagi rejeki”. Golongan sendiri dikemukakan, masyarakat dilupakan. Seorang Menteri memperoleh tugas dari partainya untuk melakukan tindakan-tindakan-tindakan yang memberi keuntungan bagi partainya. Seorang Mnteri perekonomian misalnya melakukan tugas itu dengan melakukan lisensi dengan bayaran tertentu untuk mengisi kas partainya. Atau dalam pembagian lisensi itu kepada pedagang dan importir

⁴¹ Sri Edi Swasono & Fauzi Ridjal, *Op.Cit*, 115.

⁴² Herbert Feith & Lance Castles, *Op.Cit*, hal. 83.

atau eksportir, orang yang separtai dengan dia didahulukannya. Keperluan uang untuk pemilihan umum menjadi sebab kecurangan itu.”⁴³

Peran partai politik pada masa Demokrasi Terpimpin sebagai alat perjuangan aspirasi rakyat, rekrutmen politik dan pengatur konflik termasuk katagori yang kecil. Peran tersebut terbagi kepada Presiden Soekarno sebagai Presiden yang memiliki kekuasaan yang besar, TNI, dan PKI. Presiden Soekarno menjadikan partai politik berada di bawah kekuasaanya, dengan jalan memasukkan anggota partai yang menjadi anggota parlemen merangkap menjadi Menteri di Kabinetnya yang disebut Kabinet Gotong-Royong. Alasan Presiden Soekarno adalah partai politik yang begitu banyak tidak kondusif dalam menjaga persatuan bangsa. Pengalaman menunjukkan, pemerintahan tidak pernah stabil karena adanya oposisi dari partai politik yang tidak ikut atau keluar dari koalisi partai di Kabinet. Peran partai yang demikian sesuai dengan gagasan Presiden Soekarno sebagaimana dikatakannya:

“Konsepsi saya mengenai merasionalkan partai politik begini. Tadi saya katakan marilah kita tidak pandang bulu lagi tidak menanyakan lagi apakah engkau Masyumi-kah, engkau PKI-kah, engkau NU-kah, engkau PNI-kah, engkau Protestan-kah, engkau Katolik-kah. Tidak. Semua partai di dalam parlemen , marilah kita beri hak untuk ikut duduk dalam Kabinet yang saya sebut Kabinet gotong-royong. Sekian anggota dalam parlemen, sekian Menteri di dalam Kabinet. Partai-partai yang kecilpun mempunyai kesempatan duduk di dalam Kabinet meski dalam bentuk sekedar Wakil Menteri.”⁴⁴

Kebijakan Presiden Soekarno diterapkan dengan melaksanakan penataan partai politik melalui Penetapan Presiden (Penpres) No.7 Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat penyederhanaan partai politik. Kebijakan ini pada dasarnya pemerintah memiliki kewenangan membubarkan partai politik. Kebijakan ini mengakibatkan jumlah partai politik merosot tajam dari sekitar 30 (tiga puluh) pada masa Demokrasi Parleментар menjadi 10 (sepuluh) pada masa Demokrasi Terpimpin, sementara dua

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Herbert Feith & Lance Castles, *Op.Cit*, hal.69-70.

partai politik dibubarkan yaitu PSI dan Masyumi.⁴⁵ Partai politik pada masa ini harus sejalan dengan ideologi Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis).

Tabel 4

Peran Partai Politik Masa Demokrasi Terpimpin

Peran	Kategori
Penyalur Aspirasi Rakyat	Rendah
Rekrumen Politik	Rendah
Pengatur Konflik	Rendah

Peran partai politik masa sistem Demokrasi Pancasila sebagai alat perjuangan aspirasi rakyat belum optimal, peran partai lebih didominasi ide pemimpin bangsa. Peran partai politik yang demikian disebabkan, Presiden Soeharto memiliki kekuasaan secara sentral dalam menentukan arah kebijakan negara. Presiden Soeharto menjadi Golkar sebagai partai yang dominan dan menjadi alat pemberi keabsahan kekuasaannya. Partai politik lainnya PPP dan PDI tidak memiliki kekuasaan yang berarti di DPR dan tidak diberi kekuasaan di dalam Kabinetnya.

Struktur organisasi Golkar pengurusnya terdiri dari unsur-unsur pemerintah. Pimpinan Pusat dipimpin langsung oleh Presiden Soeharto selaku Ketua Dewan Pembina Golkar yang memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengendalikan organisasi dan kebijakan partai, dibantu oleh para Menteri. Pengurus pada tingkat provinsi dikomandoi oleh Gubernur, pada tingkat kabupaten/kota dikomandoi oleh Bupati/Walikota. Kebijakan-kebijakan Presiden Soeharto, Gubernur, bupati/Walikota sering diarahkan menarik dukungan rakyat untuk kepentingan kemenangan Golkar pada setiap Pemilu.

Pelaksanaan kebijakan Presiden Soeharto terhadap partai politik diatur melalui UU No. 3. tahun 1975. Undang-undang memberikan kekuasaan kepada Presiden Soeharto untuk membekukan pengurus partai politik dan Golongan Karya.

⁴⁵ Nazaruddi, Sjamsuddin, *Op.Cit*, hal. 5.18-5.19.

Kewenangan Presiden tersebut tercantum di dalam Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan,

“Dengan kewenangan yang ada padanya, Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat membekukan Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik atau Golongan Karya yang ternyata melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Pasal2, Pasal 7 a dan Undang-undang ini.” .

Undang-undang ini membatasi wilayah kepengurusan partai politik atau yang dikenal dengan kebijakan massa mengambang (*floating mass*). Partai politik hanya diperkenankan melakukan kegiatannya sampai Kabupaten atau daerah tingkat II. Sistem yang demikian tidak memungkinkan partai politik untuk melakukan kegiatan politik di tingkat pedesaan, tempat massa partai politik yang paling besar, sehingga partai politik kehilangan pengaruhnya di tengah rakyat pedesaan.

Kebijakan lainnya terhadap partai politik yakni melalui Peraturan Menteri Dalam negeri No.6 tahun 1970 yang intinya melarang pegawai negeri menjadi anggota partai politik, dengan peraturan tersebut mengurangi pengaruh partai politik terhadap pegawai negeri. Pegawai negeri sebelumnya merupakan basis massa partai politik.⁴⁶ Pemerintahan Orde Baru menerapkan kebijakan yang mengharuskan partai politik berasaskan Pancasila sebagai asas tunggal partai politik.⁴⁷

Kebijakan Presiden Soeharto yang menempatkan partai politik di bawah kekuasaannya dilandasi kebijakan yang dilaksanakannya pada masa itu. Kebijakan yang dicanangkan Presiden Soeharto yakni melaksanakan pembangunan ekonomi yang menyeluruh, untuk mendukung kebijakan pembangunan ekonomi tersebut harus didukung oleh stabilitas politik yang dinamis. Salah satunya adalah menyederhanakan kekuasaan partai politik dalam sistem politik. Alasannya adalah pengalaman masa sebelumnya partai-partai politik oposisi lebih banyak meluangkan waktu untuk mengancam dan menjatuhkan pemerintah, sehingga lebih banyak waktu diperlukan

⁴⁶ *Ibid*, hal. 5.18-5.25.

⁴⁷ Lili Romli, *Op.Cit*, hal. 1-2.

untuk membentuk pemerintahan koalisi baru dari pada melaksanakan pembangunan ekonomi.

Peran partai politik dalam hal rekrutmen politik dalam pengertian peran secara mandiri sangat kecil. Partai politik hanya mempunyai kewenangan untuk mencalonkan, namun keputusan akhir lolos tidaknya seorang calon kewenangannya ada pada Departemen Dalam Negeri. Seorang calon yang dapat lolos menjadi calon anggota DPR, setelah lolos penelitian khusus (Litsus) dengan berbagai kriteria yang ditentukan sendiri oleh pemerintah. Kondisi seperti ini, partai politik masa demokrasi Pancasila termasuk katagori menengah.

Peran partai politik sebagai pengatur konflik termasuk katagori yang rendah. Partai politik yang ada masa itu yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) selama masa Orde Baru diwarnai konflik internal partai. Kasus PDIP misalnya, pada tahun 1978 terjadi konflik antara kelompok Sanusi Hardjadinata sebagai Ketua Umum partai dengan Achmad Sukarmadidjaja sebagai salah seorang Ketua Partai. Konflik diawali tuduhan kelompok kedua terhadap kelompok pertama menyalahgunakan kewenangan menghadapi persidangan pertama DPR MPR terutama dalam pencalonan Presiden Soeharto sebagai Presiden RI. Akibat konflik internal ini, pada tanggal 16 Oktober 1980, Ketua Umum PDIP Sanusi Harjadinata menundurkan diri.⁴⁸

Salah satu Partai politik tingkat konflik internalnya relatif rendah hanya Golkar, karena Presiden Soeharto berperan langsung selaku pengendali partai. Peran sebagai pengendalian konflik masa Demokrasi Pancasila dikendalikan secara langsung oleh ABRI (TNI).

Tabel 5

Peran Partai Politik Masa Demokrasi Pancasila

Peran	Katagori
-------	----------

⁴⁸ Manuel Kaisiepo, "Dilema Partai Demokrasi Indonesia" Perjuangan Mencari Identitas", dalam *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia Pilihan Artikel Prisma*, Jakarta: LP3ES, 1991, hal, 323-326.

Penyalur Aspirasi Rakyat	Rendah
Rekrutmen Politik	Menengah
Pengatur Konflik	Rendah

Peran partai politik dalam sistem politik Indonesia pada Demokrasi Reformasi sebagai sarana perjuangan aspirasi rakyat termasuk katagori rendah. Partai politik terjebak pada politik pragmatisme, terutama untuk memenangkan Pemilu Presiden, Pemilu DPR, dan Pemilu kepala Daerah. Hal ini didukung dengan ideologi partai politik untuk mengikat pemilih. Partai politik masa Demokrasi Reformasi mengalami perubahan fungsi dari memperjuangkan kepentingan masyarakat dan negara menjadi alat perjuangan kepentingan kekuasaan bagi sekelompok kecil pengurusnya. Partai politik dijadikan kendraan politik untuk memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompok yang tidak berkaitan dengan tujuan reformasi dan demokrasi untuk melaksanakan perubahan Indonesia yang lebih demokratis, adil dan sejahtera.⁴⁹

Peran partai politik dalam rekrutmen politik termasuk yang besar, hampir semua lembaga negara melibatkan partai politik yang memiliki kursi di DPR. Partai politiklah yang berperan yang menentukan arah, gerak dan dinamika penyelenggaraan negara, secara langsung atau tidak langsung. Peran partai politik secara langsung berupa mencalonkan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Preiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota pada Pemilu, kecuali mencalonkan anggota DPD. Peran partai politik secara tidak langsung yang dilakukan melalui fraksinya di DPR yaitu mencalonkan anggota BPK, MA dan MK.⁵⁰

Peran partai politik pada masa Demokrasi Reformasi dalam mencegah konflik termasuk katagori yang rendah, partai politik tidak mampu mencegah konflik (*conflict resolution*) internal partai. Kecenderungan yang terjadi, konflik internal partai berakibat terpecahnya partai menjadi partai baru. Sebagaimana yang dialami konflik internal Golkar pada tahun 1998. Konflik internal terpecah menjadi beberapa

: ⁴⁹ Daniel Sparringa, *Op.Cit*, hal. xxiv.

⁵⁰ Ramlan Surbakti, *Op.Cit*, hal. 140.

partai politik yaitu, Partai politik Golkar dipimpin oleh Akbar Tandjung, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) dipimpin oleh Edy Sudrajat, Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (PPGR) dipimpin oleh Ny. Mien Sugandhi, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dipimpin oleh Hartono, Partai Patriot Pancasila dipimpin oleh Yapto S. Soerjosoemarno.⁵¹

Tabel 6

Peran Partai Politik Masa Demokrasi Reformasi

Peran	Katagori
Penyalur Aspirasi Rakyat	Rendah
Rekrutmen Politik	Tinggi
Pengatur Konflik	Rendah

Pembahasan tersebut di atas, tentang peran partai politik memberikan gambaran bahwa, peran partai politik dalam sistem politik Indonesia yaitu Demokrasi parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Reformasi dilihat dari aspek memperjuangkan aspirasi rakyat dan negara, rekrutmen politik, dan mengatur konflik politik tidak ada perubahan dari period eke periode. Peran partai politik yang menonjol hanya sebatas melaksanakan peran rekrutmen politik. Peran memperjuang aspirasi rakyat dan pengatur konflik termasuk katagori rendah. Peran partai politik dimaksud dapat dilihat dalam benntuk rumusan pada Tabel 8.

Tabel 7

Peran Partai Politik di Indonesia

Peran	Katagori
Penyalur Aspirasi Rakyat	Rendah
Rekrutmen Politik	Tinggi
Pengatur Konflik	Rendah

⁵¹ Akbar Tandjung, *The Golkar Way Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2007, hal. 110.

Perubahan yang terjadi adalah kekuasaan partai politik dalam sistem politik. Pada masa Sistem politik Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Reformasi, kekuasaan partai politik dalam sistem politik sangat besar. Partai politik memiliki kekuasaan mencalonkan Presiden dan Wakil, Anggota DPR, Anggota DPD, Gubernur, Bupati/Walikota, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Partai politik mampu mengendalikan kekuasaan Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Pada masa Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila, kekuasaan partai politik termasuk kecil, kekuasaan berada pada Presiden. Partai politik diatur dan dikendalikan oleh Presiden.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemilahan ideologi partai politik di Indonesia yang dilakukan para ilmuwan politik berdasarkan geografi dan agama. Ideologi partai politik di Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pemilahan ideologi partai politik yang cukup menonjol dan memiliki relevansi dengan politik Indonesia adalah pemilihan ideologi nasionalis, Ideologi beraliran Islam modernis dan Ideologi beraliran Islam tradisional.

Peran partai politik dalam sistem politik Indonesia melaksanakan perannya pada masa Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Reformasi tidak mengalami perubahan. Peran partai politik yang bersifat tetap adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Peran sebagai memperjuangkan aspirasi rakyat dan sebagai pengatur konflik masih tetap lemah.

B. Temuan

Temuan penelitian ini pertama, terdapat perubahan kekuasaan partai politik dalam sistem politik Indonesia. Pada masa Demokrasi parlementer, kekuasaan partai sangat besar dalam mengatur sistem politik Indonesia. Pada masa Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila kekuasaan partai termasuk kecil, Presiden memiliki kekuasaan mengatur sistem politik termasuk mengendalikan partai politik.

Kedua, partai politik yang menganut ideologi nasionalis dan partai politik Islam beraliran modernis akan selalu mewarnai dinamika politik dalam sistem politik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Castles, Lance, "Partai" dalam, Hairus Salim (Penyunting), *Tujuh Mesin Pendulang Suara*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Dhakidae, Daniel, "Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia", *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, Pilihan Artikel Prisma, Jakarta: LP3ES, 1991.
- _____ (ed), *Partai Politik Indonesia Ideologi dan Proram 2004-2009*, Jakarta: PT Kompas, 1999.
- Feith, Herbert & Lance Castles (ed), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Kantaprawira, Rusadi, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru, 1985
- Krissantono (ed), *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila*, Jakarta: CSIS, 1976.
- Masaki, Okamoto dan Abdur Rozaki, "Pengantar Editor" dalam Okamoto Masaki dan Abdur Rozaki (ed), *kelompok Kekerasan dan Bos Lokal di Era Reformasi*, Yogyakarta: Center for Southeast Asian Studies (CSES) Universitas Koyoto Jepang dan IRE Press, 2006.
- Mas'ood, Mohtar, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Pamungkas, Sigit, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Institute For Democracy (IDW), 2011.
- R. Evans, Kevin, "Pola Partai politik di Indonesia" dalam Andy Ramses & La Bakry (ed), *Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: MIPI, 2009.
- Romli, Lili, *Problematik Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*, Orasi penguatan Profesor Riset Bidang Politik dan pemerintahan Indonesia, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 20 Desember 2017.
- Sparringa, Daniel, "Transisi Demokrasi di Indonesia Menstrukturkan sebuah Peta Jalan Baru", dalam Akbar Tandjung, *The Golkar Way Survival Partai Golkar*

di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2007.

Tandjung, Akbar, *The Golkar Way Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2007.

Singka Subekti, Valina, *Menyusun Konstitusi Transisi Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Sjamsuddin, Nazaruddin dkk, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 1998.

S. Lev, Daniel, “Partai-Partai Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Parlementer (1950-1957) dan Demokrasi Terpimpin (1957-1965)”, dalam Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1996.

Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Vol I (Panitia Penerbit Di bawah Bendera Revolusi, cetakan ke 2, 1963.

Surbakti, Ramlan , “Perkembangan Partai Politik di Indonesia”, dalam Andy Ramses M & La Bakry (ed), *Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Masyarakat Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI), 2009.

Swasono, Sri Edi & Fauzi Ridjal, *Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 1992.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: 1998.

Undang-Undang No.8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya
Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik
Maklumat Pemerintah 3 Nopember 1945.